

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempa dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian system perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renja OPD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan Rencana kerja RKPD 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara dan merupakan tahap akhir dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian akan dibahas bersama – sama dengan BAPELITBANG Kabupaten PadangLawas Utara dan OPD lain dalam kegiatan Forum OPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan tersusunnya perubahan rencana kerja 2024 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program / kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 guna pencapaian target–target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam Perubahan Rencana Kerja RKPD 2024.

Gunungtua, 15 Agustus 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



Drs. Ali Akbar Siagian, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196506011990031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	: i
DAFTAR ISI	: ii
DAFTAR TABEL	: iii
BAB I. PENDAHULUAN	: 1
1.1 Latar Belakang	: 1
1.2 Landasan Hukum	: 2
1.3 Maksud dan Tujuan	: 4
1.4 Sistematika Penulisan	: 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Sampai Triwulan II	6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol	16
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
BAB IV. PENUTUP	26

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II.....	7
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 5) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kemudian /badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merumuskan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi. Dalam menyusun Perubahan Rencana kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Bappeda meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bapelitbang mengkoordinasikan penyusunan Perubahan RKPD menggunakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perubahan RKPD memuat rencana kerja kerangka ekonomi daerah, program prioritas

pembangunan daerah, Perubahan rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menunjukkan prakiraan maju.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam forum internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan program/kegiatan/sub-kegiatan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2024.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015- 2035;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tanggal 15 Agustus 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, sub-kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan/sub-kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun tujuannya adalah:

1. Pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan program, kegiatan Tahun 2024;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirangkum dalam 4 (Empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan renja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III: Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta pendanaan perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya internal.
- Bab IV : merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol sampai Triwulan II

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang tertuang ke dalam 6 program dan 26 kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana, sesuai pencapaian target kinerja keluaran masing-masing program/kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 telah mewakili seluruh kegiatan yang ada. Semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada program atau kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tercapainya sasaran kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan OPD lainnya, secara nyata diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara, yang diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024-2026. (Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai dengan Triwulan II).

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi capaian penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota								
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja	6	0	2	2	100%		2	33%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat Daerah	3		1	1	100%		1	33%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3		1	1	100%		1	33%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	2	2	1	50%	0	3	25%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3	1	1		0%		1	33%

8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1	1	1	100%		2	67%
8.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan aset/barang	3				0%		0	0%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9	3	0	0	0%	0	3	33%
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	9	3			0%		3	33%
8.01.01.2.05.11	Bimtek Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundangan	0				0%		0	0%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1820	633	720	720	100%	422	1775	98%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	2	2	2	100%	2	6	50%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	2	1	1	100%		3	100%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	87	29	29	29	100%	15	73	84%

8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1700	596	684	684	100%	401	1681	99%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	1	3	3	100%	0	4	27%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6		2	2	100%		2	33%
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7	1	1	1	100%		2	29%
	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2				0%		0	0%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1584	528	528	528	100%	396	1452	92%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	12	12	12	100%	12	36	100%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	12	12	12	100%	12	36	100%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1512	504	504	504	100%	372	1380	91%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103	26	28	28	100%	29	83	81%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	4	4	4	100%	5	13	72%

8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan	83	22	24	24	100%	24	70	84%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2				0%		0	0%
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE CAPAIAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3505	1351	1083	1083	100%	800	3234	92%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3505	1351	1083	1083	100%	800	3234	92%
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5	1	3	3	100%		4	80%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	3500	1350	1080	1080	100%	800	3230	92%
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	PERSENTASE CAPAIAN Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	33	4	3	3	100%	15	22	67%

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	33	4	3	3	100%	15	22	67%
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	33	4	3	3	100%	15	22	67%
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2				0%		1	50%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15	4	2	2	100%	1	7	47%

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15	4	2	2	100%	1	7	47%
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	15	4	2	2	100%	1	7	47%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0				0%		0	0%
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0				0%		0	0%
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	Persentase capaian Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya	317	112	111	111	100%	1	224	71%
8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	317	112	111	111	100%	1	224	71%

8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	17	2	4	4	100%	1	7	41%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	110			0%		110	73%
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150		107	107	100%		107	71%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1800	420	456	456	100%	55	931	52%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1800	420	456	456	100%	55	931	52%

8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1800	420	456	456	100%	55	931	52%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700	350	405	320	79%		670	96%

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Padang Lawas Utara agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD.

Berkenaan dengan rencana program, terdapat program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Penghayatan dan Pengamalan Nilai Pancasila
2. Kinerja Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di Daerah
3. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di Daerah
4. Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) daerah yang efektif;
5. Pendidikan politik masyarakat di Daerah;
6. Pendidikan Politik bagi pengurus Partai Politik
7. Peningkatan Kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran Ormas;
8. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan Ormas;
9. Fasiltiasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
10. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas meningkatkan keamanan dan kenyamanan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang prima bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : (Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara).

Tabel T-C.33
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								44.638.971.725	36.705.514.952	73.310.413.369	28.671.441.644							4.898.279.150
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							44.638.971.725	36.705.514.952	73.310.413.369	28.671.441.644							4.898.279.150	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44.638.971.725	36.705.514.952	73.310.413.369	28.671.441.644							4.898.279.150	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Predikat	B Predikat	2.486.379.225	2.547.412.411	2.302.302.619	148.061.760							2.634.440.985	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	4.999.700	4.999.700	-	-4.999.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		5.008.000	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	4.999.700	4.999.700	-	-4.999.700	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.008.000	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.726.418.125	1.625.535.911	1.551.435.819	-174.982.306			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		1.873.269.280	

8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				192 Orang/bulan	192 Orang/bulan	1.726.418.125	1.625.535.911	1.551.435.819		-174.982.306	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.873.269.280
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	208.901.400	208.901.400	141.032.400		-67.869.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		207.423.705
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	41.245.100	41.245.100	41.245.100		-	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			41.270.753
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	8.637.300	8.637.300	8.637.300		-	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			8.500.700
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	11.052.000	11.052.000	11.052.000		-	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			11.034.000
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>			15 Dokumen	15 Dokumen	13.000.000	13.000.000	10.000.000		-3.000.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			13.000.000	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			401 Laporan	67 Laporan	134.967.000	134.967.000	70.098.000		-64.869.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			133.618.252	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	-	-	-	-	-	-			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			-	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>			-	1 Unit	-	-	-	-	-	Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			-	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	429.520.000	591.435.400	467.515.400		37.995.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		437.680.000	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	4.040.000		-5.960.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.000.000
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			12 Laporan	12 Laporan	48.960.000	48.960.000	48.960.000		-	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		48.960.000
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			168 Laporan	377 Laporan	370.560.000	532.475.400	414.515.400		43.955.400	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		378.720.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	116.540.000	116.540.000	142.319.000		25.779.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	111.060.000
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			5 Unit	11 Unit	89.440.000	89.440.000	123.049.000		33.609.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		83.960.000
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			24 Unit	17 Unit	27.100.000	27.100.000	19.270.000		-7.830.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			27.100.000
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE CAPAIAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100 Persen	100 Persen	602.592.900	602.592.900	1.169.950.400		31.245.265							633.838.165
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>			2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	602.592.900	602.592.900	1.169.950.400		567.357.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		633.838.165
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>			800 Orang	1550 Orang	602.592.900	602.592.900	1.169.950.400		567.357.500	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			633.838.165
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PERSENTASE CAPAIAN Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			100 Persen	100 Persen	30.244.259.700	27.265.509.741	55.480.136.650		-28.964.259.700							1.280.000.000

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>			1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	30.244.259.700	27.265.509.741	55.480.136.650	25.235.876.950		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.280.000.000
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>			15 Dokumen	13 Dokumen	30.244.259.700	27.265.509.741	55.480.136.650	25.235.876.950	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.280.000.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000					50.000.000

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>			3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	50.000.000
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		50.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA			100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	180.380.800	20.000.000						50.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya</i>			100 Persen 3 Sub Kegiatan	100 Persen 3 Sub Kegiatan	30.000.000	30.000.000	180.380.800	150.380.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	50.000.000
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															

		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	180.380.800		150.380.800	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		50.000.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				100 Persen	100 Persen	11.245.739.900	6.229.999.900	14.147.642.900		-10.995.739.900						250.000.000	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	11.245.739.900	6.229.999.900	14.147.642.900		2.901.903.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		250.000.000
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>			55 Orang	55 Orang	11.245.739.900	6.229.999.900	14.147.642.900		2.901.903.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		250.000.000
J U M L A H							44.638.971.725	36.705.514.952	73.310.413.369		50.739.751.137						4.898.279.150

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana kerja ini merupakan komitmen dan arah bagi seluruh aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan harus dijadikan sebagai pedoman dan gerak langkah dalam melaksanakan tugas untuk itu integritas dan profesional sumber daya manusia harus menjadi persyaratan utama.

Akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan karena rencana kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan rencana kerja yang telah disusun ini. Semoga perubahan rencana kerja dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.

Gunungtua, 15 Agustus 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Padang Lawas Utara



Drs. Ali Akbar Siagian, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196506011990031007